

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, H. Zainal dan Amiruddin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.
- Kusnardi, Moh. dan Ibrahim Harnaily. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia.
- Lubis, M. Solly. 1983. *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan mengenai Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alumni.
- Moloeng, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Rosdakarya.
- Muhammad, Bushar. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Radjab, Dasril. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Rahayu, Esmi Warassih Puji. 2006. *Penelitian Socio Legal, Dinamika Sejarah dan Perkembangannya*, Workhop Pemutaakhiran Metodologi Penelitian Hukum. Bandung.
- Sirtha, I Nyoman. 2008. *Aspek Hukum dalam Konflik Adat di Bali*. Denpasar : Udayana University Press.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1985. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Undang-undang Nomor 19 tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

<http://berita.suamamerdeka.com/sm cetak/kades-kembali-kelola-tanah-bengkok/> diakses pada tanggal 23 September 2015.

Kudus Dalam Angka 2015, <http://www.kuduskab.go.id/pdf/kda2015.pdf>, diakses pada tanggal 4 April 2016.

<http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/Yustisia/article/viewFile/928/872>, diakses pada tanggal 18 april 2016.